



## PELUNCURAN SRN PPI VERSI TERBARU

**Teddy Prasetiawan**  
Analisis Legislatif Ahli Madya  
[teddy@dpr.go.id](mailto:teddy@dpr.go.id)

## Isu dan Permasalahan

Pada hari Senin, 25 Agustus 2025, di Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) secara resmi meluncurkan versi terbaru Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim, yang dikenal sebagai SRN PPI Versi Beta. SRN PPI didefinisikan sebagai sistem pengelolaan, penyediaan data, dan informasi berbasis web yang mencakup seluruh aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta implementasi nilai ekonomi karbon (NEK) di Indonesia. Mulai dari upaya pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, hingga dukungan internasional, semua terhubung dalam satu sistem.

Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon (PPITKNEK) KLH, Ary Sudijanto, dalam berbagai kesempatan menekankan bahwa SRN PPI versi terbaru adalah jawaban atas kebutuhan akan sebuah sistem yang dapat diakses semua pihak dan, yang terpenting adalah, dapat dipercaya oleh dunia internasional. Ia menegaskan bahwa pembaruan sistem ini tidak sekadar pembaruan fitur, namun lebih dari itu, juga menunjukkan bahwa Indonesia siap bertransisi dari sekadar negara dengan potensi karbon menjadi negara yang mampu mengelola potensi tersebut dengan kredibilitas kelas dunia.

Beberapa pengembangan fitur yang ada pada SRN PPI Versi Beta, antara lain, *pertama*, lebih modern, adaptif, dan *user friendly*. Tujuannya adalah untuk mempermudah akses dan penggunaan bagi pemangku kepentingan, mulai dari kementerian teknis di tingkat pusat, pemerintah daerah, pengembang proyek dari sektor swasta, hingga komunitas lokal. *Kedua*, peningkatan integritas dan keamanan data. Peningkatan keamanan data menjadi prioritas utama untuk melindungi informasi sensitif terkait proyek dan emisi. Selain itu, sistem ini dirancang untuk menjamin akurasi, konsistensi, dan keterlacakan (*traceability*) data yang lebih baik, yang merupakan prasyarat mutlak untuk mendukung terciptanya pasar karbon berintegritas tinggi (*high integrity carbon market*).

*Ketiga*, peningkatan visualisasi data interaktif. Salah satu fitur baru yang paling menonjol adalah kemampuan visualisasi data yang lebih jelas dan interaktif. Ini memungkinkan pengguna untuk membaca dan memahami data aksi iklim yang kompleks dengan lebih mudah. *Keempat*, penyederhanaan verifikasi dan pelaporan. Sistem ini memperkenalkan mekanisme verifikasi yang lebih mudah dan sederhana. Proses yang lebih efisien diharapkan dapat mendorong lebih banyak pihak untuk mendaftarkan dan melaporkan aksi iklim mereka secara akurat dan tepat waktu. *Kelima*, memungkinkan interoperabilitas sistem yang lebih baik. Ini merupakan peningkatan strategis yang memungkinkan sistem ini terhubung dan bertukar data antarsistem, misalnya, sistem data energi dan data kehutanan sehingga mengurangi silo data antarlembaga. Namun, yang tidak kalah penting dan menjadi harapan publik adalah sistem ini memiliki mekanisme pelacakan yang mampu memonitor implementasi *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia dengan lebih detail dan akurat. Ini mencakup kemampuan untuk memilah dan melacak capaian target mitigasi dan adaptasi di berbagai sektor, serta aliran dukungan internasional yang diterima Indonesia.

Perkembangan SRN PPI tentunya patut diapresiasi. Di satu sisi, Indonesia menjadikan sistem ini sebagai platform transparansi yang memastikan publik dan para pemangku kepentingan untuk memantau progres pelaksanaan kebijakan iklim di bawah NDC. Namun, di sisi lain, SRN PPI diharapkan juga dapat menjadi katalisator pasar karbon Indonesia dengan menjadi landasan utama dalam membangun kepercayaan pasar. Tanpa sistem pencatatan yang kuat dan transparan, investor domestik maupun internasional tidak akan memiliki keyakinan terhadap aset karbon yang diperdagangkan sehingga pasar karbon Indonesia tidak dapat berkembang. Perlu dicatat bahwa keberhasilan penerapan SRN PPI tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologinya, tetapi juga perlu menjawab tantangan-tantangan mendasar seperti fragmentasi data antarkementerian, kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang tidak merata di tingkat daerah, dan metodologi perhitungan yang belum sepenuhnya terstandarisasi. Oleh karena itu, peluncuran SRN PPI versi terbaru perlu diikuti dengan solusi dalam mengatasi permasalahan mendasar yang dihadapi Indonesia saat ini.

## Atensi DPR

Peluncuran SRN PPI Versi Beta merupakan sebuah langkah maju bagi pengelolaan perubahan iklim di Indonesia. Sistem ini menyediakan infrastruktur digital yang sangat dibutuhkan untuk era baru tata kelola iklim yang lebih transparan, terintegrasi, dan akuntabel. Untuk itu, Komisi XII DPR RI perlu memastikan agar sistem baru ini terimplementasi dengan baik serta memastikan operasionalisasinya dapat berjalan dengan lancar, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Selain itu, Komisi XII DPR RI perlu terus mengawasi komitmen pemerintah dalam mengatasi permasalahan mendasar, seperti fragmentasi data antarkementerian, kapasitas SDM yang tidak merata di tingkat daerah, dan metodologi perhitungan yang belum sepenuhnya terstandarisasi, agar SRN PPI versi terbaru ini dapat sepenuhnya menjembatani jurang yang lebar antara ambisi iklim Indonesia yang tinggi dengan realitas implementasi yang kompleks dan penuh tantangan di lapangan.

## Sumber

antaranews.com, 25 Agustus 2025;  
dml.org.id, 2 September 2025;  
kemenlh.go.id, 25 Agustus 2025;  
mediaindonesia.com, 26 Agustus 2025;  
republika.id, 25 Agustus 2025; dan  
tempo.co, 25 Agustus 2025.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Edmira Rivani  
Teddy Prasetiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Firyal Nabihah  
Ulayya Sarfina  
Yosua Pardamean S.  
Jeffrey Ivan Vincent  
Fauzan Lazuardi R.  
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making*